

**PEMIKIRAN POLITIK H.O.S TJOKROAMINOTO TENTANG
PERAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**ANDRI KURNIAWAN
NPM.1621020271**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**PEMIKIRAN POLITIK H.O.S TJOKROAMINOTO TENTANG
PERAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

ANDRI KURNIAWAN

NPM.1621020271

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H.,M.A

Pembimbing II : Drs. H.Ahmad Jalaluddin, S.H.,M.M

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Politik merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mencapai ataupun mempertahankan sebuah kekuasaan, dimana politik ini melibatkan seorang aktor politik sebagai konseptor dalam menjalankan visinya, hal ini dapat dilakukan secara individual ataupun dilakukan secara berkelompok di lingkungan manusia.

HOS Tjokroaminoto merupakan salah satu seseorang aktor politik yang banyak memberikan dan meletakkan pondasi awal bangunan Republik ini melalui pemikiran dan pergerakannya, HOS Tjokroaminoto sa'at ini mendapat Julukan Sang Guru Bangsa. HOS Tjokroaminoto lahir di Madiun, pada 16 Agustus 1882, ia berasal dari keluarga bangsawan. Pergerakan dan pemikiran Tjokroaminoto diawali sa'at beliau bergabung dengan Sarekat Dagang Islam (SDI) pada 1912. Kehadiran Sarekat Dagang Islam (SDI) ini melihat adanya pengaruh politik belanda yang membahayakan umat ataupun rakyat dalam beragama, maka Sarekat Dagang Islam (SDI) ini dibentuk untuk melindungi dan mengayomi umat islam khususnya di Indonesia dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai dasar Hukum Tertinggi Islam.

Permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana Pemikiran HOS Tjokroaminoto tentang peran dan fungsi partai politik? dan Bagaimana pandangan fiqh siyasah tentang peran dan fungsi partai politik dalam pemikiran politik HOS Tjokroaminoto? Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui secara mendalam pemikiran politik HOS Tjokroaminoto tentang peran dan fungsi partai politik, dan untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah tentang peran dan fungsi partai politik menurut HOS Tjokroaminoto.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*Library Reseach*), yaitu penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur (Kepustakaan) dan konten analisis yang bersumber pada buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian dahulu, dengan menggunakan metode *Historis* artinya selalu berhubungan dengan sejarah, sejarah adalah tentang masa lalu. Metode *Historis* bertujuan untuk merekonstruksi masa secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, menilai, memferivikasi dan mensentisiskan bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan.

Berdasarkan hasil penelitian kiranya dapat dikemukakan bahwa pemikiran politik HOS Tjokroaminoto tentang peran dan fungsi partai politik sudah sesuai dengan konsep fiqh siyasah, karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam fiqh siyasah. Salah satunya yakni menjadikan Al-Qur'an dan Al-Sunnah Rasul sebagai Dasar atau Hukum tertinggi.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung, (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PEMIKIRAN POLITIK H.O.S
TJOKROAMINOTO TENTANG
PERAN DAN FUNGSI PARTAI
POLITIK PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH**

**Nama Mahasiswa : Andri Kurniawan
NPM : 1621020271
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah
Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mainun, S.H., M.A

Drs. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M

NIP. 196003291987031003 NIP. 195703051978031001

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEMIKIRAN POLITIK H.O.S TJOKROAMINOTO
TENTANG PERAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH** disusun oleh **Andri**

Kurniawan, NPM. 1621020271 Jurusan Hukum Tata Negara
(Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari Rabu,
Tanggal 19 Februari 2020.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : **Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**

Sekretaris : **Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.**

Penguji 1 : **Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

Penguji 2 : **Dr. Maimun, S.H., M.A.**

Penguji 3 : **Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.**



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Ahmad Jalaluddin, M.H.
196210221993031002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.”

(Q.S Muhammad’[47]:7).



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah *subhaanahu wa ta'alaa* atas selesainya penulisan skripsi ini, penulis mempersembahkannya untuk:

1. Allah S.W.T Sebagai Rabb, Malik, Illah Tuhan semesta Alam. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya yang senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhkan diri dari putus asa hingga skripsi ini dapat selesai di waktu nya.
2. Baginda Nabi Allah Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai uswatun hasanah sang motivator yang melahirkan pergerakan revolusioner dalam berhukum, bersistem, dan bernegara dengan bingkai akhlaqul karimah.
3. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ngadimun dan Ibu Aas Sulastri. Lantunan Al-Fatihah beriring sholawat dalam do'aku merintih, berdo'a dalam syukur yang tiada terkira. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Bapak dan Ibu ku tercinta. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan semangat, nasihat serta do'a yang takkan tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap halang rintang yang ada di depanku. Di setiap langkah ku, aku akan berusaha untuk mewujudkan cita-cita dan harapan kalian impikan dari diriku, meskipun semua itu belum dapat ku raih. Insyaallah atas do'a dan dukungan dari kalian semua, mimpi dan harapan itu akan terjawab semua ketika Allah berkata *Kun Fayakun*.
4. Kepada kedua adikku. Ade Firman Syahru dan Muhammad Nur Habib. Kakakmu kini sudah lulus dek berkat do'a dan dukungan dari kalian. Semoga

apa yang kita cita-citakan dijabah oleh Allah S.W.T. Semoga kalian juga bisa berada dijenjang pendidikan ini bahkan di atas lagi. Kita harus bisa buat bapak dan ibu kita bangga dengan anak-anaknya, baik itu di dunia maupun di akhirat.

5. Saudara-saudara satu visi misiku. Syukron atas do'a, dukungan dan motivasinya. Semoga kiranya Allah S.W.T senantiasa meneguhkan hati kita untuk istiqomah dalam jalur kebenaran hingga maut menjemput kita.
6. Teman-teman seperjuanganku Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) kelas D angkatan 2016, terima kasih untuk 4 tahunnya. Semangat untuk kita semua, perjuangan kita tidak hanya sampai disini. Gerbang kesuksesan menanti kita di depan!!
7. Kepada kanda, yunda, dan adinda sehimpunku. terimakasih atas dukungan morilnya, semoga Allah S.W.T mengistiqomahkan kita semua dalam memperjuangkan terbinanya insan akademis pencipta, pengabdian yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah S.W.T.
8. Teman-teman 40 hari KKN kelompok 87 dan 88 Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Terkhusus juga untuk kepala desa kertosari bapak Albert Halomoan Sidauruk, serta kepada pakde Tarwidi dan keluarga yang sudah menjadi keluarga baru kami dan menjadikan Kertosari sebagai desa kedua bagi kami.
9. Sahabat-sahabatku yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Tetap semangat, semoga Allah permudah segala urusan dan langkah kita.

10. Spesial buat seseorang. Buat seseorang yang masih menjadi rahasia Illahi. Nama mu belum dapat ku tulis di dalam skripsi ini. Tapi yakinlah, hanya namamu yang tercatat di Lauhul Mahfudz ku. Semoga kita dapat segera bertemu ketika Allah sudah menentukan di waktu yang tepat.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta staff karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang memberikan banyak ilmu dan motivasi bagi saya selama di bangku perkuliahan. Terkhusus kepada Dosen pembimbingku Bapak Dr.Maimun,S.H.,M.A selaku pembimbing 1, dan kepada Bapak Drs.H.Ahmad Jalaluddin,S.H.,M.M selaku pembimbing 2 yang selalu sabar dan penuh kepedulian dalam membimbing dan mengarahkanku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, tiada untaian kata yang paling indah melainkan hanya do'a yang patut ku haturkan Semoga Allah membalas semua kebaikan dan jasa-jasa Bapak dan Ibu Dosen sekalian.
12. Almamater ku tercinta, UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Andri Kurniawan

Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 16 Juni 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Lintas Way Abung, Rk/Rt.03, Tiyuh Marga Asri,
Kecamatan Tulang Bawang Tengah, kabupaten Tulang
Bawang Barat

Agama : Islam

Email : andriscout16061998@gmail.com

PENDIDIKAN

- Taman Kanak-kanak : TK Bustanul Athfal, Mulya Asri (2002-2004)
- Sekolah Dasar : SDN 01 Mulya Asri (2004-2010)
- Sekolah Menengah Pertama : SMPN 01 Tulang Bawang Tengah (2010-2013)
- Sekolah Menengah Atas : SMAS Yadika Bandar Lampung (2013-2016)
- Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2016-2020)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Bismillahirrohmanirrohim...

Alhamdulillahirobbil 'alamiin, Segala puji hanyalah milik Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya berupa nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat Iman dan nikmat kesempatan, sehingganya skripsi dengan judul “Pemikiran Politik HOS Tjokroaminoto tentang Peran dan Fungsi Partai Politik Perspektif Fiqh Siyasah” dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul akhir nanti. Aamiin

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada strata satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) di UIN Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis menyadari skripsi ini tidak dapat berjalan tanpa adanya bantuan dan dukungan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr.H Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs.H. Ahmad Jalaluddin, S.H.,M.M selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta membimbing penulis sejak awal masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Maimun, S.H.,M.A. selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan banyak masukan berupa nasihat dan motivasi kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

6. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah yang telah dengan keikhlasan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Kepada seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Semoga semua do'a, bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan sebaik-baiknya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta para pembaca pada umumnya.

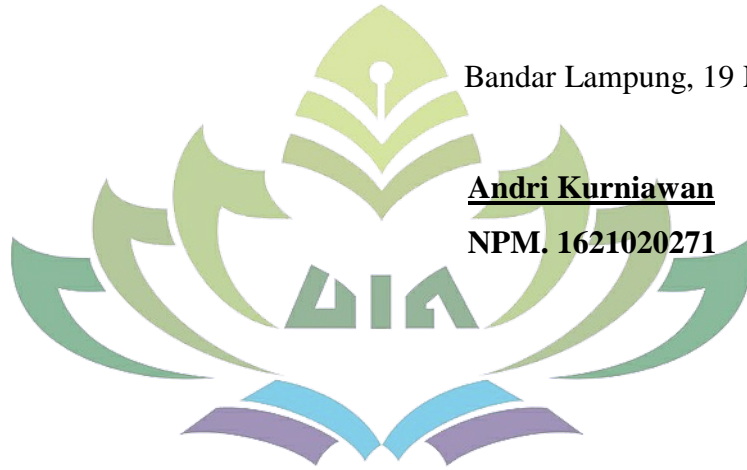
Aaamiin ya Robbal 'alamiin..

Wassalamualaikum warrohmatullahi wabarokatuh..

Bandar Lampung, 19 November 2019

Andri Kurniawan

NPM. 1621020271



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
1. Alasan Objektif	3
2. Alasan Subjektif.....	4
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Fokus Penelitian.....	14
F. Tujuan Penelitian	14
G. Manfaat Penelitian	15
H. Metode Penelitian	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Partai Politik	20
1. Pengertian Partai Politik Secara Umum.....	20
2. Pengertian Partai Politik dalam Islam.....	21
B. Perkembangan Partai Politik Islam di Indonesia	25
C. Partai Sarekat Islam	30
1. Pengertian Sarekat Islam	30
2. Hari Lahir Sarekat Islam	31
3. Dasar Sarekat Islam	32
4. Tujuan Sarekat Islam	38

5. Hukum Tertinggi Sarekat Islam.....	40
6. Peran & Fungsi Sarekat Islam	41
D. Fiqh Siyasah.....	43
1. Pengertian Fiqh Siyasah	43
2. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Siyasah.....	44
3. Siyasah Syar'iyah	45
E. Tinjauan Pustaka.....	47

BAB III PEMIKIRAN POLITIK H.O.S TJOKROAMINOTO

A. Biografi HOS Tjokroaminoto	52
1. Riwayat Hidup HOS Tjokroaminoto	52
2. Karya-karya H.O.S Tjokroaminoto.....	64
B. Pokok Pemikiran Politik HOS Tjokroaminoto	67
1. Triologi Sebagai Landasan Prinsip	67
2. Gerak langkah Perjuangan Sarekat Islam (S.I)	70

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pemikiran H.O.S Tjokroaminoto tentang Peran dan Fungsi Partai Politik.....	77
B. Pandangan Fiqh Siyasah tentang Peran dan Fungsi Partai Politik Menurut H.O.S Tjokroaminoto.....	82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perolehan Suara Dan Kursi Parpol Islam	29
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“Pemikiran Politik HOS Tjokroaminoto Tentang Peran Dan Fungsi Partai Politik Perspektif Fiqh Siyasah”**.

Sebelum menguraikan pembahasan penelitian dengan judul tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan berbagai istilah yang terdapat pada penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi pembaca. Dalam penegasan judul ini akan di jelaskan secara umum cakupan penelitian serta membatasi arti kalimat dalam penulisan agar makna yang di maksud dapat digambarkan dengan jelas.

1. Pemikiran adalah memikirkan suatu kebenaran yang sudah ada untuk mendapatkan kebenaran yang baru, jadi pemikiran berarti suatu pandangan atau pendapat seseorang atau kelompok untuk melahirkan suatu gagasan.¹
2. Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, segala urusan dan tindakan, kebijaksanaan, siasat mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain.²
3. Haji Oemar Said yang selanjutnya disingkat (HOS) Tjokroaminoto adalah seorang Guru Bangsa dan beliau pula merupakan salah satu pahlawan nasional di Indonesia, Beliau lahir di Bakur, Madiun pada

¹ Hasbullah Bakry, *Sistematika Filsafat* (Jakarta: Wijaya, 1979), h. 38.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Kedua) (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 320.

tanggal 16 Agustus 1882, Beliau banyak memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan bangsa Indonesia dalam melawan prilaku feodal melalui buah pemikiran dan pergerakannya.³

4. Peran adalah orang yang melakukan suatu tindakan dalam suatu peristiwa atau kegiatan.⁴

5. Fungsi adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan suatu hal.⁵

6. Partai Politik adalah kumpulan dari sekelompok orang dalam masyarakat yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan atau pemerintahan atau negara atau mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama.⁶

7. Perspektif adalah suatu tinjauan atau pandangan luas, dalam artian pendapat seorang atau golongan tentang arti suatu peristiwa, baik dalam keadaan sekarang maupun untuk masa yang akan datang.⁷

8. Fiqh Siyasah adalah suatu ketentuan kebijaksanaan pengurus masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam dan sumber-sumber pokok siyasah syar'iyah adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah, kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk

³Seri Buku Tempo: Bapak Bangsa, *Tjokroaminoto Guru Para Pendiri Bangsa* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2011), h.7.

⁴“Definisi Peran”, (On-line), tersedia di: <http://kkbi.web.id/peran> (30 April 2019)

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2003), h. 78

⁶A.A. Said Gatara, *Sosiologi politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 221.

⁷Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* (Edisi Lengkap), Cetakan Pertama (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 371.

menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bernegara.⁸

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul skripsi di atas adalah suatu telaah tentang pemikiran politik HOS Tjokroaminoto tentang peran dan fungsi partai politik di Indonesia, kemudian dianalisa dengan pendekatan Fiqh Siyasah.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Secara objektif, HOS Tjokroaminoto adalah seorang Guru Bangsa yang juga merupakan Guru dari bapak Proklamator Indonesia yakni Ir. Soekarno dan beliau juga merupakan salah satu tokoh pahlawan Nasional. HOS Tjokroaminoto bagaikan “Dewa Penolong” pada tahun-tahun permulaan Organisasi politik Sarekat Islam, ide-ide dan gagasan khususnya dalam hal perannya sebagai ketua organisasi politik diakui banyak pihak memberi kontribusi bagi bangsa Indonesia dalam melawan perilaku feodalisme. Dengan pidato-pidatonya, HOS Tjokroaminoto menumbuhkan semangat kebangsaan, juga harapan. Rakyat jelata menganggapnya “Ratu Adil” dan pemerintah Belanda menjulukinya “Raja Tanpa Mahkota”. Dan kini, kita mengingatnya sebagai bapak para pendiri bangsa.

⁸J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 26.

Sehingga mendorong penulis untuk mengetahui serta mengkaji pemikiran politik HOS Tjokroaminoto tentang peran dan fungsi partai politik Perspektif Fiqh Siyasah.

2. Alasan Subjektif

- a. Data dan literatur yang mendukung pembahasan cukup tersedia, sehingga skripsi ini mampu diselesaikan tepat pada waktunya.
- b. Masalah yang sedang dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis alami, yaitu Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

C. Latar Belakang Masalah

Politik merupakan salah satu identitas dalam menjalankan roda pemerintahan dalam suatu Bangsa dan Negara, dimana politik ini merupakan media yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat menunjukan eksistensi dirinya sebagai warga negara. Menurut maknanya sendiri, Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam suatu Negara.⁹ Politik berasal dari bahasa Yunani, *polis* yang berarti kota atau negara-kota. Dalam kamus bahasa Inggris *politic* memiliki pengertian mengatur, seni memerintah dan mengatur masyarakat, ilmu memerintah dan mengatur negara. Dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai taktik/strategi. Sedangkan dalam kamus bahasa Arab disebut dengan *al-siyasah* yang terambil dari akar kata *sasa-yasusu-Siyasah* berarti mengurus.

⁹“Definisi Politik”, (On-line), tersedia di :<https://id.m.wikipedia.org/wiki/politik> (8 Mei 2019)

Sedangkan menurut Ibnu Aqil dalam buku *Fiqh Politik Islam* karangan Farid Abdul Khaliq mengemukakan bahwa politik adalah suatu perbuatan yang bila dilakukan oleh manusia yang hasilnya lebih dekat kepada perbaikan dan lebih jauh dari kerusakan.¹⁰

Sejarah partai politik dapat ditelusuri kemunculannya di Eropa Barat yang menganut sistem demokrasi. Negara-negara di sana menganggap masyarakat adalah individu-individu yang patut dilibatkan dalam proses politik pengambilan kebijakan negara. Pada masa itu, parpol lahir sebagai jembatan antara masyarakat dan negara. Pada 1850 negara-negara di dunia belum mengenal apa itu parpol, kecuali di Amerika Serikat. Setelah 1950, parpol-parpol mulai bersemai di berbagai negara “beradab”. Maurice Deverger menyebut perkembangan parpol sejalan dengan perkembangan demokrasi itu sendiri, karena sejatinya parpol adalah satu diantara banyak pilar demokrasi.¹¹

Partai Politik yang selanjutnya disebut (Parpol) adalah sebuah kelompok otonom dalam masyarakat yang mengikuti Pemilu dengan harapan memenangkannya agar memperoleh kekuasaan di pemerintahan, baik di dalam eksekutif maupun legislatif.¹² Peran dari parpol sangatlah penting, karena peran parpol merupakan salah satu media dan syarat bagi para calon kandidat yang akan ikut serta dalam Pemilu. Partai politik secara umum dapat dikatakan bahwa suatu kelompok terorganisir yang anggota-

¹⁰Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 106.

¹¹ Maurice Duverger, “Political Parties: Their Organization and Activity in Modern State”, dalam Ichlasul Amal, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988), h. 1.

¹² M. Amin Nurdin, et.al., *Prahara Partai Islam; Komparasi Konflik Internal PPP dan PKS* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), h. 17

anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan programnya.¹³

Munculnya parpol di era modern dapat ditelusuri dari upaya pengorganisasian kepentingan masyarakat dalam politik. Masyarakat tidak mungkin dapat langsung menyalurkan keinginan mereka kepada elite penguasa (baik eksekutif maupun legislatif). Keadaan demikian memunculkan ide untuk membuat wadah sebagai penyalur aspirasi politik mereka. Proses ini pada perkembangannya melahirkan parpol. Dalam perjalanannya, parpol tidak hanya menampung aspirasi yang muncul dari bawah. Parpol menjelma menjadi alat bagi kader-kader untuk duduk pada lembaga legislatif dan Eksekutif. Dengan demikian, parpol semakin mudah menyalurkan aspirasi masyarakat karena mereka terlibat dalam pembuatan kebijakan.¹⁴ Sementara dalam konteks Indonesia, parpol lahir dari kegelisahan penjajahan yang berlangsung selama berabad-abad. Oleh karena itu, parpol lahir sebagai wadah masyarakat untuk melawan penjajahan.

Kondisi politik bangsa Indonesia saat ini seperti sedang mendominasi wacana di media. Layaknya gula yang sedang dikelilingi semut, seperti itulah media yang memberitahukan kondisi politik di Indonesia hari ini. Kondisi politik di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Para pejabat masih saja sibuk mengurus kursi jabatannya dan lagi-lagi mereka melupakan soal

¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2014), h. 403-404.

¹⁴ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 57.

rakyat. Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia telah melaksanakan pesta Demokrasi. Para calon kandidat yang menginginkan kursi di parlemen baik dilembaga Legislatif (DPR-RI/DPR-D dan DPD) maupun dilembaga Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), melalui Partai Politik mereka mencoba mencari perhatian masyarakat dengan menyampaikan visi dan misinya yang tujuannya untuk mendapatkan suara masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tersebut.

Oleh karena itu, peran dan fungsi partai politik pada hakikatnya menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Namun saat ini, masyarakat memandang partai politik sebelah mata karena banyak para kader-kader partai politik yang duduk di kursi parlemen melakukan tindakan-tindakan pidana seperti halnya tindakan kasus Korupsi. Fungsi dan peran partai politik tertuang di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Menjelaskan bahwa : “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, serta bangsa dan Negara.”¹⁵

Istilah partai dalam Islam disebut dengan perkataan *Hizb*. *Hizb* secara *lughawi* mempunyai makna: Pertama, suatu komunitas yang memiliki kesamaan konsep dan aktivitas. Kedua, kumpulan yang memiliki kekuatan

¹⁵Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pasal 1 ayat (1).

dan persaudaraan. Ketiga, kader serta partisipannya. Mengikuti pengertian istilah, partai (*hizb*) adalah suatu kumpulan masyarakat yang menyatu karena memiliki arah, sasaran dan tujuan yang sama.¹⁶

Perkataan *hizb* terdapat di dalam firman Allah :

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ آلَ حَزَابٍ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

Artinya :

“Dan tatkala orang-orang mukmin melihat partai-partai musuh yang bersekutu itu, mereka berkata: “Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita.” Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. (Q.S Al-Ahzab[33]:22).

Islam memiliki tokoh politik yang sangat luar biasa yang bernama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bukan hanya sosok pengkhotbah yang tidak peduli dengan dunia realitas. Beliau adalah figur yang senantiasa menggelorakan perubahan total demi menuju peradaban Nubuwwah berdasarkan *Dustur-Illahiyah*. Awal pertumbuhan Negara Islam muncul pertama kalinya di Madinah. Masyarakat Islam saat itu memiliki iklim yang memungkinkan berdirinya sebuah Negara. Mereka pun memiliki kekuasaan pemerintahan yang mengatur urusan-urusannya.

Masyarakat Islam di Madinah merupakan masyarakat politik, mereka mulai eksis dan memainkan perannya serta beralih dari prinsip-prinsip teoritis berubah menjadi prinsip-prinsip praktis setelah berada di Madinah.

¹⁶ Hasanudin Yusuf, “Partai Politik Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2014), h. 487-488.

Pemerintahan Islam telah berdiri di Madinah dengan fungsinya sebagai sebuah organisasi pertahanan, mempersiapkan mekanisme untuk melaksanakan keadilan di antara manusia, menyebarkan ilmu, menghidupkan sektor ekonomi, mengikat perjanjian, dan melakukan berbagai kerja sama.¹⁷

Nabi Muhammad SAW (W.10H/632M) adalah seorang kepala Negara. Pada waktu yang bersamaan pula, beliau adalah seorang Nabi, manusia biasa, dan utusan Allah. Inilah seorang rasul yang layak menjadi teladan bagi kita semua, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya:

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.”
(QS.Al-Ahzab [33] :21).

Ayat di atas menjelaskan kepada kita semua agar meniru Rasulullah SAW dalam semua ucapan, perbuatan, dan sikap terjangnya. Oleh karena itu, Allah menjadikan Rasulullah sebagai *Uswatun Khasanah* (contoh yang baik) bagi kaum mukmin agar meniru sikap Beliau dalam hal kesabaran, keteguhan hati, kesiagaan, perjuangannya, dan tetap menanti jalan keluar dari Allah SWT.

¹⁷Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2010), h.242.

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan tidak semudah membalikkan telapak tangan, semua ini dapat terwujud dengan adanya pengorbanan dan perjuangan para pahlawan bangsa. Salah satu pahlawan bangsa yang menyumbangkan sebuah pola pikir dan pergerakannya dengan membuat suatu perkumpulan atau organisasi politik yang menjadikan suatu wadah sebagai aspirasi dan konspirasi rakyat dalam berkumpul dan berserikat sebagai bentuk perlawanan terhadap perilaku feodalisme di Indonesia, beliau adalah seorang Guru bangsa Haji Oemar Said yang disingkat (HOS) Tjokroaminoto .

Sosok HOS Tjokroaminoto yang merupakan salah satu Tokoh Politik di Indonesia yang banyak memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara melalui pemikiran dan pergerakannya yang bernuansa Islam. HOS Tjokroaminoto merupakan Ketua Sarekat Islam yang selanjutnya disingkat (SI), yaitu sebuah organisasi yang awalnya merupakan perkumpulan para pedagang batik Solo yang didirikan oleh Haji Samanhoedi pada 16 Desember 1905 bersama K.H Asmo Dimejo (H.M Hisyam), M. Kerto Taruno, K.H Abdul Rozak yang bernama Sarekat Dagang Islam yang selanjutnya disebut (SDI) merupakan awal Pergerakan Islam yang lahir di solo. SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia, pada awalnya Organisasi yang dibentuk oleh K.H Samanhudi dan kawan-kawannya ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda karena mereka memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu.

Pada tahun 1912 SDI merubah nama menjadi syarikat Islam (SI).¹⁸ sehingga keanggotaannya bukan hanya para pedagang Islam tapi sudah umum dan mencakup semua kalangan masyarakat dan profesi. Sarekat Dagang Islam (SDI) yang pada awalnya merupakan pergerakan dibidang ekonomi dan sosial menjadi pergerakan Politik dan Agama untuk menyumbangkan semangat perjuangan Islam dalam semangat juang rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme pada masa itu.

Pada tahun 1913 dalam Musyawarah Sarekat Islam (SI) pertama, HOS diangkat sebagai Ketua. Sarekat Islam berhasil menggugah kesadaran politik bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia tidak boleh tinggal diam dan menerima nasib dijajah oleh Belanda, bangsa Indonesia harus bangkit untuk menentukan nasibnya sendiri, konflik etnis dan kultur dirombak kearah nasionalitas. Sarekat Islam (SI) bermetamorfosis menjadi organisasi pergerakan yang telah beberapa kali berganti nama yaitu Central Sarekat Islam (CSI) tahun 1916, Partai Sarekat Islam (PSI) pada tahun 1920, Partai Sarekat Islam Hindia Timur (PSIHT) pada tahun 1923, Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) pada tahun 1929.

Semenjak HOS Tjokroaminoto berada dalam Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) sebuah organisasi yang bertujuan menjadikan Indonesia dengan landasan Islam apabila merdeka kelak sehingga dalam setiap kesempatan Tjokroaminoto mendidik kader-kadernya untuk tetap memegang teguh cita-cita mendirikan Pemerintahan sendiri (*Zelfbestuur*).

¹⁸ M.A.Gani, *Cita Dasar & Pola Perjuangan Syarikat Islam* (Jakarta: P.T Bulan Bintang, 1984), h.7.

Dalam fungsinya Partai Sarekat Islam Indonesia didirikan sebagai lokomotif perjuangan Sesuai dengan perkataan HOS Tjokroaminoto bahwa: “Kaum Partai Sarekat Islam Indonesia percaya bahwa untuk menjadikan Ummat Islam yang Bersatu, lebih dahulu di dalam seluruh Indonesia mesti dibangun satu kaum (Partai), yang tidak berpecah-pecah atau terbagi-bagi.”¹⁹ dalam mencapai tujuan yang diharapkan bahwa cita partai politik Islam adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Mempersatukan Ummat Islam dan Bangsa
- b. Memerdekakan Ummat baik secara politik maupun ekonomi
- c. Menerapkan sebuah sistem pemerintahan yang berasaskan Islam
- d. Memperbaiki kehidupan ekonomi ummat
- e. Memperbaiki keadaan dan derajat manusia
- f. Mewujudkan kemerdekaan yang sejati.

Persatuan yang demikian itulah dibangun oleh kaum Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) yang di dalam persatuannya itu menjadi sebagian pula persatuan ummat Islam dunia.²¹ Oleh karena itu, menurut konsep Tjokroaminoto bahwa tujuan membangkitkan kesadaran umat Islam adalah agar Umat Islam siap dan mau menduduki kembali kekuasaan serta timbul kesadaran agar berani membangun kembali kekuasaan Politik Islam yang pernah eksis di Nusantara Indonesia.

¹⁹ M.A.Gani, *Cita Dasar & Pola Perjuangan Syarikat Islam* (Jakarta: P.T Bulan Bintang, 1984), h.54.

²⁰ *Ibid*, h.80-160.

²¹ H.O.S Tjokroaminoto, *Tafsir Program dan Program Syarikat Islam Indonesia* (Jakarta: Lajnah Tanfidziah PSII, 1972), h.16.

Konsep HOS Tjokroaminoto : “Tidak bisa manoesia mendjadi Oetama jang sesoenggoeh-soenggoehnja, tidak bisa manoesia mendjadi besar dan moelia dalam arti kata jang sebenarnya, tidak bisa ia mendjadi berani dengan keberanian jang soeci dan oetama, kalau anda banjak barang jang ditakoeti dan disembahnja.” Ungkapnya. “keotamaan, kebesaran, kemoliaan, dan keberanian jang sedemikian itoe, hanjalah bisa terjapai karena “Tauhid” sahadj. Tegasnja, menetapkan lahir batin “Tidak ada sesembahan, melainkan Allah sahadj”. Oleh karena itu, apalah arti umat Islam sebagai mayoritas, apabila berjuang merebut kembali kemerdekaan, tetapi tidak ada kesiapan, kemauan, dan keberanian untuk memantaskan menduduki kekuasaan. Pasti akan terjajah kembali.”²²

HOS Tjokroaminoto sebagai ketua partai politik yang dalam pergerakan dan pemikiran politiknya selalu bernuansa Islam, untuk itu menarik untuk dikaji dalam konteks Fiqh Siyasah yang di mana dalam objek kajian Fiqh Siyasah adalah tentang hubungan antara pemerintahan dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.²³

Kajian mengenai Pemikiran-pemikiran HOS Tjokroaminoto akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Pemikiran Politik HOS Tjokroaminoto Tentang Peran dan Fungsi Partai Politik Perspektif Fiqh Siyasah.”**

D. Rumusan Masalah

²² Seri Buku Tempo, *Tjokroaminoto Guru Para Pendiri Bangsa* (Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia,2011),h.28

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta:Prenadamedia Group,2014), h.17.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran politik HOS Tjokroaminoto tentang peran dan fungsi partai politik ?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap pemikiran politik HOS. Tjokroaminoto tentang peran dan fungsi partai politik?

E. Fokus Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu memberikan batasan masalah. Dalam penelitian ini akan fokus pada pemikiran politik HOS Tjokroaminoto tentang peran dan fungsi partai politik (Partai Sarekat Islam) dalam perspektif fiqh siyasah.

F. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara mendalam pemikiran politik HOS Tjokroaminoto tentang peran dan fungsi partai politik serta kiprahnya dalam bidang politik dalam melawan feodalisme serta berbangsa dan bernegara.
2. Untuk menganalisis pemikiran politik HOS Tjokroaminoto tentang peran dan fungsi partai politik perspektif Fiqh Siyasah.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang bersifat teoritis, yaitu memperluas wawasan terhadap peran dan fungsi partai politik Sarekat Islam Indonesia dalam Pemikiran HOS Tjokroaminoto serta dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman untuk mengetahui pemikiran politik HOS Tjokroaminoto tentang peran dan fungsi partai politik Perspektif Fiqh Siyasah.

b. Bagi Masyarakat Umum

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman serta mengetahui pemikiran politik HOS Tjokroaminoto tentang peran dan fungsi partai politik Perspektif Fiqh Siyasah.

c. Bagi Masyarakat Akademis

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan informasi kepustakaan bagi UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.²⁴

Dan membahas dalam penelitian penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan Sifat penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan.

Data diperoleh dengan mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini dan literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan di kaji.

Penelitian ini bersifat konten analisis, yang dimaksud dengan metode konten analisis adalah suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif (gambaran), gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.²⁵

²⁴Joko Suvbagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta:PT.Rineka Cipta 1994), h.2.

²⁵Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2015), h.58.

Sedangkan analisis yaitu suatu proses mengatur urutan data, Mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data.²⁶

Berdasarkan jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan konten analisis yaitu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif (gambaran), gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada sehingga kemudian melakukan uraian dasar dan melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data, pola pemikiran HOS Tjokroaminoto tentang peran dan fungsi partai politik perspektif Fiqh Siyasah.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah koleksi data-data atau nilai numeric (angka) sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁷

Data ini termasuk data sekunder, karena sumber data pada penelitian perpustakaan pada umumnya bersumber pada data sekunder artinya bahwa penelitian ini memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan. Yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang bersumber pada buku-buku pokok, Al-Qur'an, dan Hadits serta Karya HOS Tjokroaminoto ataupun Buku yang berkaitan dengan Tokoh.

²⁶*Ibid.* h.68.

²⁷Suharsimi Ariitkumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Edisi Revisi IV) (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.114.

- b. Bahan hukum sekunder yang bersumber pada buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yang bersumber pada kamus, ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah riset kepustakaan, yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data yang terdapat diruangan perpustakaan. Dengan kata lain teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data yang bersumber dari data primer (Al-Qur'an, dan Hadits), sekunder (buku, majalah, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini), maupun tersier (kamus, ensiklopedia, yang berkaitan dengan penelitian ini). Pada tahap pengumpulan data ini, analisis telah dilakukan untuk meringkas data, tetapi tetap sesuai dengan kajian dari isi sumber data yang relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang muncul kemudian membuat ringkasan sementara.

4. Pengolahan Data

Setelah data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian data tersebut diolah dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan, dan dokumen yang

relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas, dan tampak kesalahan.

- b. Sistem data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan kemudian hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus.²⁸



²⁸Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004), h. 127.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PARTAI POLITIK

1. Pengertian Partai Politik Secara Umum

Partai politik adalah kelompok otonom dari warga negara, memiliki kegunaan dalam membuat nominasi-nominasi dan peserta pemilu, memiliki keinginan memandu pengawasan pada kekuasaan pemerintahan terus merebut jabatan-jabatan publik dalam organisasi pemerintahan.¹

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.²

Secara operasional lebih teknis, sebagaimana digambarkan oleh Undang-Undang (UU) Politik, yaitu UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menegaskan bahwa: “partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

¹ Adam Przeworski, *Sejumlah Masalah dalam Studi Transisi Menuju Demokrasi, dalam Transisi Menuju Demokrasi* (Jakarta: LP3ES, 2003), h. 75.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 404.

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”³

2. Pengertian Partai Politik Dalam Islam

Dalam Al-Qur'an istilah partai disebut dengan perkataan *Hizb* (Partai). *Hizb* secara *lughawi* mempunyai makna: Pertama, suatu komunitas yang memiliki kesamaan konsep dan aktivitas. Kedua, kumpulan yang memiliki kekuatan dan persaudaraan. Ketiga, kader serta partisipannya. Mengikuti pengertian istilah, partai (*hizb*) adalah suatu kumpulan masyarakat yang menyatu karena memiliki arah, sasaran dan tujuan yang sama.⁴

Perkataan *hizb* terdapat di dalam Q.S Al-Ahzab[33]:22 bahwa Allah berfirman :

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَصَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

Artinya :

“Dan tatkala orang-orang mukmin melihat partai-partai musuh yang bersekutu itu, mereka berkata: “Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita.” Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan.(Q.S Al-Ahzab[33]:22).

³ Republik Indonesia, *UU No.2/2008 tentang Partai Politik* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2011).

⁴Hasanudin Yusuf, “Partai Politik Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2014), h. 487-488.

Istilah Partai dalam percaturan politik hari ini sudah sangat membaaur dengan kehidupan manusia, baik yang muslim maupun yang bukan muslim. Terkecuali kepada negara-negara yang menganut sistem monarki yang tidak menganut sistem kepartaian untuk menentukan kepala negara dan parlemen seperti: Oman, Saudi arab, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Brunei Darussalam, dan bagian Negara-negara lainnya. Sementara itu hampir sebagian negara besar telah menggunakan sistem partai sebagai salah satu perangkat dalam politik negaranya.

Para pakar *Siyasah* dalam beberapa karangan bukunya mengaitkan persoalan partai politik dengan perkataan *Hizb* dalam Al-Qur'an. Mereka menyimpulkan bahwa makna dari kata *Hizb* adalah sama untuk istilah partai pada zaman modern sa'at ini, mereka juga merujuk kepada firman Allah dalam QS. Al-Mu'minum[23]:53:

.... كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾

Artinya:

“Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing)”. (QS. Al-Mu'minum[23]:53)

Dalam ayat lain QS. Ar-Rum[30]:32 Allah SWT berfirman :

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka[1169] dan mereka menjadi beberapa golongan. tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka”. (QS. Ar-Rum[30]:32)

Berkenaan dengan perkara ini Rasullulah menerangkan dalam sebuah Hadits bahwa umat Islam pada suatu ketika:

إِفْتَرَقَ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَتَّرَقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً.

Artinya :

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, ‘Kaum Yahudi telah terpecah menjadi tujuh puluh satu (71) golongan atau tujuh puluh dua (72) golongan, dan kaum Nasrani telah terpecah menjadi tujuh puluh satu (71) atau tujuh puluh dua (72) golongan, dan ummatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga (73) golongan. (H.R at-Tirmidzi).⁵

Makna *Hizb* dan *Firqoh* dalam ayat Al-Qur’an dan Hadits diatas merujuk kepada golongan atau kelompok yang berpecah-belah. Dan Allah menjelaskan bahwa setiap dari kelompok mereka merasa bangga dan benar, maka di sinilah muncul problem atas ketidak serasian dengan kehendak Islam dari kontek memaknai perpaduan Ummah (*Ukhwah*

⁵Abdul Qadir bin Thahir al-Baghdadi, *al-Faraqn bayna al-Firaq* (Beirut: Dar al-Fikr,1973),h.4-5.Lihat juga Dr.Lukman Thaib, *Political System of Islam* (Kuala Lumpur: Amal,1994),h.77.

Islamiyah). Bahwa Islam sejatinya adalah *Ummatan wahidah*. (umma yang satu).

Dalam kamus istilah Islam, kata *Hizb Allah* diartikan dengan Partai Allah, pembela atau pengikut Agama Allah.⁶

Hizb Asy-Syaitan dalam kamus tersebut memang diartikan sebagai partai Syaitan.⁷ Namun terjemah makna dari kata Partai Syaitan dalam Al-Qur'an adalah:

..... أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾

Artinya:

“Mereka itulah Golongan Syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Syaitan itulah golongan yang merugi”. (QS.Al-Mujadillah: 19).

Maka jelaslah bagi kita bahwa konsep *Hizb* dalam Al-Qur'an memang ditunjukkan kepada mereka pengikut Allah SWT (*Hizb Allah*) dan pengikut Syaitan (*Hizb Syaitan*). Dalam arti lain, yakni mereka yang mengikuti jalan kebenaran (*Haq*) dan mereka yang mengikuti jalan keburukan/kesesatan (*Batil*). Kalaupun konsep tersebut dapat diangkat dalam mensosialisasikan partai, maka Islam hanya mengenal Partai Islam (*Hizb Allah*) yang esensi dan hakikatnya berdasarkan pada Islam, aturan Islam, pengurus Islam, dan pelaksanaanyapun Islam. Dan partai Syaitan (*Hizb Syaitan*) yang didasarkan atas ideologi yang dibuat oleh

⁶ Moh E.Hasim, *Kamus Istilah Islam*(Bandung:Pustaka,1987),h.45.

⁷ Moh E.Hasim, *Kamus Istilah Islam*(Bandung:Pustaka,1987),h.45.

Manusia (Partai yang bukan dasar Islam) yang operasionalnya mengejar uang, jabatan, pangkat, dan materi keduniaan.⁸

Sebuah Partai Politik adalah merupakan satu organisasi yang mengikat anggotanya sesuai dengan ketentuan partai yang bertujuan untuk memenagkan pemilu dalam rangka menggapai sejumlah kursi di parlemen. Apabila partai tersebut menang mutlak atau mayoritas di parlemen maka mereka akan membentuk pemerintahan negara sesuai dengan kehendak partai tersebut.⁹ Maka ada persoalan yang fundamental dalam hal ini adalah apabila partai tersebut bernuansa Islam sebagai sebuah partai Islam yang mengutamakan atas kehendak Hukum Islam bagi rakyatnya, maka keberuntungan barangkali pada pihak Umat Muslim. Namun kalaulah Partai yang memenangkan bukan dari partai Islam dan tidak mengutamakan hukum Islam walaupun partai tersebut bukan Partai Kafir, maka bisa dipastikan malapetaka dan bencana politik paling besar akan menimpa ummat Islam dan Wilayah Mayoritas.¹⁰

B. Perkembangan Partai Politik Islam di Indonesia

Fenomena berdirinya partai-partai politik Islam di Indonesia, ada beberapa penjelasan terkait perkembangannya itu sendiri yakni dapat dilihat dari faktor secara teologis, historis, sosiologis, dan faktor reformasi.

⁸ Hasanudin Yusuf Adan, "Partai Politik Dalam Perspektif Islam". *Jurnal: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, h.491.

⁹ Masudul Hasan, *Reconstruction of Political Thought in Islam* (Lahore: Islamic Publications (PVT) Limited, 1998), h.226.

¹⁰ Hasanudin Yusuf Adan, "Partai Politik Dalam Perspektif Islam". *Jurnal: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, h.491.

1. Faktor Teologis

Dalam pandangan Teologis, Agama merupakan suatu yang *Integrated*, yang menyatu tanpa dapat dipisahkan dengan Politik. Islam adalah “*Din wa Daulah*”, berdasarkan hal ini maka masalah yang ada pada masyarakat, termasuk di dalamnya masalah urusan Negara atau Politik, merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan persoalan agama. Sebagai manifestasi dari pandangan ini adalah perlu adanya kekuasaan Politik. Kekuasaan diperlukan karena dalam upaya menegakkan syari’at Islam, Hukum-hukum Islam, baik Hukum Perdata maupun Hukum Pidana. Dalam hal itu maka diperlukan Partai Politik sebagai media untuk memperjuangkan dan memenangkannya. Dengan demikian, pendirian partai politik Islam merupakan Panggilan dan perwujudan dari pandangan teologis tentang hubungan antara Agama dan Negara.

2. Faktor Sosiologis

Dapat diketahui bahwa Islam di Indonesia merupakan Agama yang Mayoritas. Penduduk Indonesia yang memeluk Agama Islam mencapai sekitar 90% dari seluruh jumlah penduduk yang ada di Indonesia yang mencapai sekitar 200 juta Orang. Maka dengan jumlah penduduk mayoritas ini sudah sepantasnya dalam hal upaya penyaluran Aspirasi politik sesuai dengan tatanan dan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini maka Partai Politik Islam dianggap sebagai wadah penyalur aspirasi perjuangan Islam. Sehubungan dengan itu maka pendirian Partai politik

Islam merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini karena secara Sosiologis umat Islam di Indonesia merupakan pemeluk mayoritas dan mereka akan merasa nyaman dan aman apabila penyaluran aspirasi politik disampaikan melalui partai politik Islam.

Maka kontek Sosiologis ini tampaknya digunakan oleh elit-elit politik Islam untuk mendirikan dan membentuk partai politik Islam. Oleh karena itu, adanya partai-partai politik Islam secara otomatis akan didukung yang basis masanya adalah umat Islam. Ditambah dengan perspektif Teologis, dimana perlunya alat perjuangan untuk mewujudkan aspirasi Islam. Kedua kontek ini maka saling mengisi dan menunjang satu sama lainnya.¹¹

3. Faktor Historis

Dalam sejarah di Indonesia, Islam merupakan suatu kekuatan yang sangat berperan dalam perlawanan menentang penjajah. Islam yang pada saat itu merupakan garda terdepan dalam melawan kolonialisme di Indonesia. Dalam rangka mengusir penjajahan tersebut diperlukan alat organisasi sebagai penyatu aspirasi dan tujuan. Maka tercatatlah berdirinya Sarekat Islam, merupakan Organisasi pertama kekuatan politik yang memiliki anggota terbanyak di antara organisasi-organisasi pergerakan lainnya yang ada di Indonesia.¹² Sarekat Islam merupakan suatu organisai Politik yang diketuai oleh seorang Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto, seorang Aktor politik Islam yang memiliki cita-

¹¹Lili Romli, "Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia". *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.1 No.1 (2004),h.29.

¹²*Ibid*,h.29.

cita tinggi atas keinginannya dalam Kemerdekaan bangsa Indonesia dalam tatanan Islam. Organisasi Sarekat Islam ke depan menjadi sebuah organisasi besar yang berevolusi nama menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).

4. Faktor Reformasi

Reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dalam menumbangkan rezim Orde Baru (ORBA) melahirkan era kebebasan. Dalam era hari ini setiap kelompok atau golongan diberi kesempatan untuk menyalurkan atau membentuk partai politik sesuai asas dan aspirasi politiknya. Kesempatan ini tampaknya tidak disia-siakan oleh para elit politik Islam dalam mendirikan partai politik Islam.¹³

Geneologi partai politik Islam di Indonesia pasca dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 yang memperbolehkan berdirinya partai-partai politik, hal ini langsung direspon oleh Umat Islam pada saat itu sehingga muncul suatu organisasi politi Islam yang bernama Masyumi yang memberi harapan bahwa keberadaan partai Masyumi ini dapat hadir sebagai media yang akan memperjuangkan aspirasi dan nasib Umat Islam Indonesia. Partai Masyumi didukung oleh dua kekuatan Ormas besar yakni NU dan Muhammadiyah.

Namun dalam perjalanannnya, para pendukung partai Masyumi keluar satu persatu. Bermula dengan keluarnya PSII pada tahun 1947, menyusul kemudian NU tahun 1952. Akibat dari pada itu pada Pemilu

¹³ Lili Romli, "Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia". *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.1 No.1 (2004),h.30.

1955, yang merupakan pemilu pertama semenjak Indonesia merdeka, kekuatan politik Islam menjadi terpecah-pecah, bukan hanya Masyumi, NU, PSII, PERTI, tetapi juga ada partai PPTI, dan AKUI. Dampak yang terjadi atas perpecahan partai-partai Islam ini maka kekuatan Politik Islam menjadi Lemah.

Dampak perpecahan itu pada saatnya akan membuat umat Islam bingung siapa sebetulnya yang menjadi Representasi dan aspirasi Islam. Hasil Pemilu 1955, terdapat banyak sekali peserta, yaitu 172 yang terdiri dari parpol dan ormas. Berdasarkan jumlah tersebut tidak semua dapat menjadi peserta. Tercatat terdapat enam parpol Islam: Partai Masyumi, Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), partai NU, Partai Persatuan Tarbiyah Indonesia (PERTI), Partai Aksi Kesatuan Umat Islam (AKUI), dan Partai Politik Tarekat Islam (PPTI). Berikut tabel perolehan suara dan kursi parpol Islam.¹⁴

Tabel 2.1.
Perolehan Suara Dan Kursi Parpol Islam

No.	Nama Parpol	Suara DPR	Presentase Suara DPR	Jumlah Kursi DPR	Suara Untuk Majelis Konstituante
1.	Masyumi	7.903.886	20,9%	57	7.778.619
2.	Partai NU	6.955.141	18,4%	45	6.989.333
3.	PSII	1.091.160	2,9%	8	1.059.922
4.	PERTI	483.014	1,3%	4	465.359
5.	PPTI	85.131	0,2%	1	74.913
6.	AKUI	81.454	0,2%	1	84.862
Total		16.599.786	43,9%	116	16.464.008

Sumber: Dalam Buku Prahara Partai Islam Komparasi Konflik Internal PPP dan PKS.

¹⁴M. Amin Nurdin, et.al., *Prahara Partai Islam; Komparasi Konflik Internal PPP dan PKS* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), h. 37.

C. PARTAI SAREKAT ISLAM

1. Pengertian Partai Sarekat Islam

Partai Sarekat Islam atau Sarekat Islam adalah sebuah organisasi masyarakat yang dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto seorang Guru Bangsa, sekaligus seorang politikus yang Agamis yang dalam keorganisasiannya berdasarkan atas Islam. Dahulu Sarekat Islam (SI) bernama Sarekat Dagang Islam disingkat (SDI) didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhoedi dan kawan-kawannya. Pada mulanya Sarekat Dagang Islam merupakan sebuah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda karena memberikan suatu keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai kompar ekonomi rakyat pada masa itu. Pada kongres pertama SDI di solo tahun 1906, Sarekat Dagang Islam berganti nama menjadi Sarekat Islam. Kemudian pada tahun 1911 K.H Samanhudi bertemu dengan HOS Tjokroaminoto di Surabaya membicarakan terkait kondisi Indonesia yang makin terhimpit oleh perlakuan pemerintah Belanda. Karena antara K.H Samanhudi dan HOS Tjokroaminoto memiliki pemikiran yang sama dalam konsep membangkitkan kesadaran perjuangan atas penindasan, maka HOS Tjokroaminoto bergabung ke dalam Sarekat Islam. Selanjutnya pada tahun 1912, melalui kongres pertama Sarekat Islam menetapkan HOS Tjokroaminoto sebagai pemimpin hal itu didasarkan atas *pertama*, Karena beliau lulusan OSVIA, sekolah administrator pastilah memiliki kepiawan teknis

maupun konseptual mengenai organisasi. *Kedua*, beliau dikenal sebagai orang yang kritis terhadap realitas sosial, terutama pembelaanya terhadap pribumi. Di sisi lain, HOS Tjokroaminoto cocok karena beliau adalah pembaca buku yang rajin, penulis berita yang tajam analisisnya, sekaligus keberpihakan terhadap pribumi, ummat, dan keta'atan dalam ber-Islam tak diragukan lagi inilah yang menjadi dasar alasan HOS Tjokroaminoto dipilih sebagai ketua Sarekat Islam.¹⁵ HOS Tjokroaminoto kemudian mengubah arah perjuangan Sarekat Islam yang pada mulanya hanya mencakup permasalahan ekonomi dan sosial menuju kearah politik dan Agama untuk menyumbangkan semangat juang rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme pada masa tersebut. Selanjutnya karena perkembangan politik dan sosial Sarekat Islam bernetamorfosis menjadi organisasi pergerakan yang beberapa kali berganti nama. Pada tahun 1916 bernama Central Sarekat Islam (CSI), tahun 1920 Partai Sarekat Islam (PSI), tahun 1923 Partai Sarekat Islam Hindia Timur (PSIHT), dan pada tahun 1923 menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).

2. Hari Lahir Sarekat Islam

Sarekat Islam lahir dari perkumpulan orang pribumi yang mengamankan Laweyan sebuah hunian para saudagar batik di Solo. Sarekat Islam (SI) yang sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) didirikan pada 16 Sya'ban 1323 H atau tepat pada 16 Oktober

¹⁵Aji Dedi Mulawarman, *Jang Oetama Jejak dan Perjuangan H.O.S Tjokroaminoto* (Yogyakarta: Galang Pustaka, 2015), h.75.

1905 M yang dipelopori oleh K.H Samanhudi (1868-1956) di Solo.¹⁶ Akibat adanya kebijakan Politik Etis yang diterapkan oleh pemerintahan Belanda sehingga berdampak terasingkannya para pedagang batik membuat KH.Samanhoedi sebagai seorang saudagar kaya yang memiliki kapasitas dan mobilitas dalam masyarakat, sehingga beliau menghimpun para pedagang batik Solo untuk bersatu dan saling bekerja sama, sehingga terbentuklah sebuah organisasi masa yang bergerak pada sektor sosial ekonomi pada tahun 1905 hal inilah cikal bakal berdirinya Sarekat Dagang Islam.

Dalam penerbitan Kementerian Penerangan Republik Indonesia PEPORA No.8 dengan judul Kepartaian di Indonesia dikutip dalam buku karangan Drs. M.A. Gani, M.A mengemukakan bahwa :

“Sekali pun pada waktu itu sudah banyak perhimpunan lainnya di lapangan sosial ekonomi, tetapi Sarekat Dagang Islam (SDI) adalah yang pertama-tama menginjak lapangan politik. Ringkasnya pada tahun 1911 Sarekat Dagang Islam (SDI) bergerak di lapangan sosial ekonomi. Satu tahun kemudian, tahun 1912 namanya berubah menjadi Sarekat Islam yang bergerak di lapangan Politik.”

3. Dasar Sarekat Islam

Sejak permulaan Sarekat Dagang Islam didirikan oleh K.H Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905 yang berkedudukan di Solo dan kemudian ketika Sarekat Islam diresmikan dengan Akta Notaris pada

¹⁶M.A.Gani, *Cita Dasar & Pola Perjuangan Syarikat Islam* (Jakarta: P.T Bulan Bintang, 1984), h.6.

10 September 1912, Sarekat Islam telah membuat dasar perjuangannya atas tiga prinsip dasar, sebagaimana berikut :

a. Asas Agama Islam Sebagai Dasar Perjuangan Organisasi

Agama Islam yang dipilih sebagai prinsip asas yang pertama karena masalah agama adalah masalah yang prinsipal dan fundamental dalam perjuangan Sarekat Islam. Sejarah bangsa Indonesia khususnya sejarah ummat Islam sendiri bahwa pemerintahan Belanda memang bertujuan untuk melenyapkan agama Islam, karena Islam dipandang oleh Belanda sebagai suatu senjata yang paling ampuh dan menjadikan sebuah ancaman yang paling berbahaya terhadap kelanggengan kekuasaannya di Indonesia.

Dalam sisi lain apabila Islam tidak dapat dilenyapkan, hendaknya jangan berkembang dan jangan sampai dapat dipergunakan sebagai alat politik. Islam hanya boleh hidup dalam arti kepercayaan saja, paling kuat yakni Islam hanya dijadikan sebagai suatu falsafah hidup atau suatu dogma yang menina bobokan ummatnya hidup dalam khayalan semata. HOS Tjokroaminoto pernah mengemukakan bahwa: "Memang sarekat Islam memakai nama agama sebagai ikatan persatuan bangsa, buat mencapai cita-cita sebenarnya, dan agama tidak akan menghambat tujuan itu."¹⁷

Pada hakekatnya K.H Samanhudi, R.M. Tirto Adisuryo, HOS Tjokroaminoto menyadari bahwa penjajahan Belanda itu tidak dapat

¹⁷Abu Hanifah, *Renungan Perjuangan bangsa Dulu dan Sekarang* (Jakarta:Yayasan Idayu,1978),h.22.

dihancurkan, tidak dapat dilawan melainkan dengan kekuatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Maka dengan itu umat Islam harus dipersatukan untuk memelihara kehormatan dan harga diri.

Ummat Islam harus dihimpun dalam suatu wadah dengan tujuan memelihara harkat dan martabat mereka sendiri, untuk membebaskan diri dari segala bentuk pembudakan dan penghambaan dari golongan penindasan pihak manapun juga. Dengan keyakinan yang kuat menyerahkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah sebagai Al-Khaliq yang menciptakan dunia alam semesta, Allah sebagai Al-Qadir yang maha menentukan, Allah sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah tempat manusia berlindung dan memohon serta berserah diri, pengaruh yang diakui adalah pengaruh Allah, dan perintah yang ditaati adalah perintah Allah. Umat Islam percaya kepada Allah dan cinta kepada Allah yaitu cinta yang dipupuk oleh iman dan taqwa kepada Allah. Manusia datang ke dunia ini karena Allah dan akan kembali karena Allah. Segala hal yang dilakukan di dunia harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.

Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh takut kepada selain Allah, orang yang takut kepada sesama manusia karena kemerdekaan jiwanya sudah hilang dan rasa takut itu dapat diatasi dan memaknai dengan mengucapkan kalimat *La ilaaha Illallah, Muhammaddur*

Rasulullah (Tidak ada *Illah* selain Allah dan nabi Muhammad itu adalah utusan Allah). Atas doktrin Islam inilah ummat Islam di Indonesia dapat dipersatukan dan dihimpun dalam satu wadah. Di dalam Islam dilarang orang menjadi rakus dan tamak. Apabila seseorang sudah sungguh–sungguh menghayati dan mengamalkan ajaran Islam maka tidak seorang pun akan diperbudak oleh pengaruh harta, tahta atau kedudukan.

b. Asas Kerakyatan Sebagai Himpunan Organisasi

Dalam masalah persaingan ekonomi ummat Islam juga mendapat perlakuan yang sewenang-wenang dari pihak golongan Cina. Cina memegang monopoli perdagangan hampir dalam segala sektor pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Keadaan ini terjadi karena golongan Cina oleh pemerintah Belanda diberikan hak-hak istimewa dan diperlakukan sebagai kaula Negara Belanda yang setingkat lebih tinggi dari penduduk pribumi (penduduk Indonesia asli). Orang-orang Indonesia lebih terlihat seperti budak dan tidak mempunyai nilai-nilai kemanusiaan ditinjau dari segi manapun.

Ketika sistem “*Cultuurstelsel*” dimulai di Indonesia, rakyat Indonesia juga yang paling menderita, karena pada sa’at itu mereka diperintahkan menanam beberapa jenis tanaman paksa antara lain tebu, kopi dan karet.¹⁸ Tanaman paksa ini adalah tanaman yang paling besar keuntungannya bagi pemerintah Belanda. Keuntungan tersebut

¹⁸M.A.Gani, *Cita Dasar & Pola Perjuangan Syarikat Islam* (Jakarta: P.T Bulan Bintang, 1984), h.6.

dibawa seluruhnya ke negeri Belanda dan praktis hampir tidak ada yang ditinggalkannya di bumi Indonesia. Usaha-usaha pembudakan terhadap rakyat Indonesia terus dilakukan oleh pemerintahan Belanda, dimana rakyat Indonesia sampai ada yang dipekerjakan di luar Indonesia yang dipaksa menandatangani kontrak kerja dan mereka tidak boleh mogok atau melarikan diri. Kalau mereka melarikan diri sebelum kontrak habis, mereka akan ditangkap polisi kemudian dijatuhkan hukuman karena melarikan diri. Setelah selesai masa hukumannya mereka harus bekerja kembali di perkebunan sebagai kuli kontrak.

Melihat kondisi penderitaan yang dialami oleh seluruh lapisan masyarakat hampir-hampir tidak tertahankan lagi, maka K.H Samanhudi mendirikan organisasi Sarekat Dagang Islam yang kemudian diubah menjadi Sarekat Islam atas dasar prinsip asas kerakyatan. Kata “Dagang” dibuang karena dianggap kurang tepat sebab tidak mencakup seluruh lapisan rakyat. Puluhan tahun sudah rakyat menderita dan selama rakyat Indonesia diperlakukan sedemikian rupa oleh Belanda dalam berbagai bentuk penindasan, protes dari masyarakat umum hampir tidak pernah terdengar. Sarekat Islamlah yang pertama kali memprotes atas tindakan sewena-wena yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda terhadap rakyat Pribumi. Ide dan asas perjuangan Sarekat Islam adalah ide dan asas kerakyatan. Sarekat Islam berjuang untuk rakyat yang miskin dan hidup sengsara.

Meskipun di antara pemimpin-pemimpin Sarekat Islam ada yang berasal dari golongan ningrat, tetapi tujuan perjuangan SI tidak pernah menyimpang dari tujuan semula. Pemimpin-pemimpin Sarekat Islam tetap berjuang untuk kepentingan rakyat jelata dengan tekad suci, yaitu kemiskinan dan kemelaratan harus dilenyapkan.

c. Asas Sosial Ekonomi

Daerah pulau Jawa dari dulu hingga sekarang merupakan daerah yang paling padat penduduknya jika dibandingkan dengan daerah-daerah atau pulau-pulau yang ada di Indonesia. Perkembangan jumlah penduduk sangat cepat di pulau Jawa karena masyarakat Jawa pada saat itu tidak terbiasa menjarangkan kelahiran anak. Karena faktor jumlah penduduk yang sangat banyak di Pulau Jawa, dan ditambah keadaan kehidupan masyarakat yang sangat bersifat feodalisme.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa golongan Cina mendapat fasilitas dan hak monopoli di bidang-bidang perdagangan, tetapi selain hal itu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Cina ini adalah adanya rasa solidaritas yang sangat tinggi antara sesama mereka sebagai perantau. Karena faktor fasilitas dan monopoli di bidang perdagangan dan solidaritas yang sangat tinggi pada masyarakat Cina, maka praktis pengusaha-pengusaha pribumi Indonesia sama sekali tidak berdaya menghadapi kelompok pengusaha Cina. Ketika K.H Samanhudi dan HOS Tjokroaminoto melihat situasi yang demikian, mereka berpendapat bahwa menghadapi tantangan-

tantangan kelompok Cina tidak mungkin hanya dihadapi oleh pengusaha-pengusaha pribumi saja. Seluruh potensi nasional khususnya ummat Islam harus dikerahkan dalam usaha mempertahankan hak dan martabat bangsa Indonesia. Atas dasar itulah maka K.H Samanhudi menghilangkan kata “Dagang” pada nama organisasi Sarekat Dagang Islam sehingga organisasi itu tidak hanya milik kaum pedagang, tetapi seluruh ummat Islam harus turut bertanggung jawab dan mempunyai rasa turut memiliki organisasi (*Sense of belonging*). K.H Samanhudi menginginkan agar rasa seluruh ummat Islam merasa memiliki dan bagian dari anggota organisasi Sarekat Islam, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan-tantangan ekonomi dan pengusaha-pengusaha Cina.¹⁹

4. Tujuan Sarekat Islam

Setelah mengetahui asas perjuangan Sarekat Islam, maka timbul pertanyaan bahwa untuk apa Sarekat Islam berjuang? Ada orang yang berpendapat bahwa suatu organisasi didirikan hanya sekedar alat untuk kepentingan pribadi. Pendapat yang seperti itu memang ada dan memang bukan tidak mungkin orang-orang yang sejak awal sudah berniat masuk ke dalam suatu organisasi hanya dengan tujuan untuk mencari pangkat dan harta kekayaan untuk kepentingan pribadi. Sarekat Islam semula bernama Sarekat Dagang Islam, tujuannya seperti yang disampaikan oleh K.H Samanhudi bahwa ada empat buah pokok pikiran yang dijadikan

¹⁹*Ibid*, h.25.

sebagai tujuan perjuangannya. Pertama memperbaiki nasib rakyat dalam bidang sosial ekonomi, kedua mempersatukan pedagang-pedagang batik agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang Cina, ketiga hendak mempertinggi derajat dan martabat bangsa Indonesia asli yang ada pada sa'at itu sering disebut dengan istilah bumi putera, keempat memperkembangkan serta memajukan agama Islam serta pendidikan agama Islam. Ruang lingkup tujuannya tegas dan jelas yaitu sosial, ekonomi, persatuan, menjunjung martabat bangsa dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ajaran Islam.

Tujuan pada saat permulaan, bentuknya sangat sederhana, kemudian lebih dipertegas ketika Sarekat Islam diresmikan dengan Akte Notaris pada tanggal 10 September 1912. Drs.Susanto Tirtoprojo,S.H dalam buku karangan Drs. M.A Gani, MA yang berjudul Cita Dasar & Pola Perjuangan Sarekat Islam mengemukakan tulisannya sebagai berikut :

“Di dalam Akte Notaris yang memuat statute dari perkumpulan Sarekat Islam itu tertanggal 10 September 1912 ditetapkan tujuan dari perkumpulan tersebut dengan Tujuan :²⁰

- a. Memajukan perdagangan. Jadi tujuan itu tetap dipertahankan.
- b. Memberikan pertolongan kepada anggota-anggota yang mengalami kesukaran. Jadi semacam koperasi, bantu membantu.
- c. Memajukan kepentingan rohani dan jasmani dari penduduk asli. Di sini ternyata tujuan tidak hanya terbatas kepada anggota saja.

²⁰ *Ibid*, h.27.

d. Memajukan kehidupan agama Islam.

5. Hukum Tertinggi Sarekat Islam

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara setiap anggota Sarekat Islam harus mendasarkan pola tingkah lakunya, ucapan dan sikap serta pandangan hidupnya atas nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-sunnah. Al-Qur'an dan Al-Sunnah merupakan Hukum tertinggi yang digunakan bagi setiap anggota kaum Sarekat Islam dalam mengemban tugas dan pandangan hidupnya terutama dalam pelaksanaan amalan ibadahnya sehari-hari.

Sejak awal terbentuknya Sarekat Dagang Islam. *Dinul Islam* (Agama Islam) sudah menjadi asas dalam organisasi. Berdasarkan pedoman Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai hukum tertinggi bagi anggota Sarekat Islam, maka setiap warga Sarekat Islam dilarang memperbesar atau memperuncing masalah furu dan khilafiyah karena hal tersebut dapat menimbulkan dan menumbuhkan pertentangan antar ummat Islam sendiri. Apabila ummat Islam secara konsekuen menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah Rasul, maka bukan hanya terwujudnya persatuan Ummat Islam menjadi kokoh dan kuat. Ibarat batu karang yang tidak akan hancur dan lapuk oleh hempasan gelombang dan badai, tetapi juga akan menjadi satu-kesatuan yang kuat dan tangguh sehingga mampu menghantarkan ummat Islam kearah pembangunan lahir dan batin. Al-qur'an telah memuat prinsip-prinsip pokok dan garis-garis besar mengenai tata hidup dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara baik untuk individu-individu maupun untuk pemimpin-pemimpin masyarakat dan para pejabat pemerintahan atau para penguasa negara.²¹

6. Peran dan Fungsi Partai Sarekat Islam

Sarekat Islam yang merupakan sebuah organisasi politik memiliki peranan yang sentral dalam menghimpun rakyat pribumi untuk bersatu dalam cita dan tujuan yang sama. HOS Tjokroaminoto memiliki peran yaitu seorang pelopor berdirinya sebuah organisasi politik sebagai wadah perjuangan, menampung aspirasi dan konspirasi umat pada saat itu, menanamkan nilai-nilai Islam sebagai dasar hidup manusia, serta menggugah semangat perjuangan umat untuk keluar dari perilaku penjajahan. HOS Tjokroaminoto adalah seorang muslim yang mukmin dan taat kepada agamanya, yaitu Islam. Seorang pemimpin besar, seorang pendekar ulung dalam dunia pergerakan kemerdekaan Indonesia, dan termasuk pelopor dari pembaharuan-pembaharuan pengamalan Islam. Beliau juga seorang wartawan, pengarang, dan orator yang dikagumi oleh kawan dan disegani oleh lawan.

Dalam fungsinya Partai Sarekat Islam Indonesia didirikan sebagai lokomotif perjuangan. Sesuai dengan perkataan H.O.S Tjokroaminoto bahwa: “Kaum Partai Sarekat Islam Indonesia percaya bahwa untuk menjadikan Ummat Islam yang Bersatu, lebih dahulu di dalam seluruh Indonesia mesti dibangun satu kaum (Partai), yang tidak berpecah-

²¹ M.A.Gani, *Cita Dasar & Pola Perjuangan Syarikat Islam* (Jakarta: P.T Bulan Bintang, 1984),h.39.

pecah atau terbagi-bagi.”²² Maka hal inilah yang menjadi fungsi terbentuknya Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) untuk mencapai tujuan yang diharapkan, bahwa cita partai politik Islam adalah sebagai berikut:²³

- a. Mempersatukan Ummat Islam dan Bangsa.
- b. Memerdekakan Ummat baik secara politik maupun ekonomi.
- c. Menerapkan sebuah sistem pemerintahan yang berasaskan Islam.
- d. Memperbaiki kehidupan ekonomi ummat.
- e. Memperbaiki keadaan dan derajat manusia.
- f. Mewujudkan kemerdekaan yang sejati.

Persatuan itu dibangun oleh kaum Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) yang di dalam persatuannya itu menjadi sebagian pula persatuan ummat Islam se dunia.²⁴ Oleh karena itu, menurut konsep Tjokroaminoto bahwa tujuan membangkitkan kesadaran umat Islam adalah agar Umat Islam siap dan mau menduduki kembali kekuasaan serta timbul kesadaran agar berani membangun kembali kekuasaan Politik Islam yang pernah eksis di Nusantara Indonesia. HOS Tjokroaminoto menggelorakan persatuan bangsa karena ia memimpikan kemerdekaan. Merdeka dari penjajahan Belanda yang menindas *Wong Cilik*. Terbukti perjuangan HOS.Tjokroaminoto membuat gusar pemerintahan Belanda sehingga keberadaannya menjadi setitik harapan bagi rakyat jelata.

²² M.A.Gani, *Cita Dasar & Pola Perjuangan Syarikat Islam* (Jakarta: P.T Bulan Bintang, 1984), h.54.

²³ *Ibid*, h.80-160.

²⁴ H.O.S Tjokroaminoto, *Tafsir Program dan Program Syarikat Islam Indonesia* (Jakarta: Lajnah Tanfidziah PSII, 1972), h.16.

D. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah berasal dari dua suku kata “*Fiqh*” dan “*Siyasah*”. Kata Fiqh berasal dari *Faqaha-yafaqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian Fiqh adalah “Paham yang mendalam”. Secara istilah Fiqh diartikan dengan Upaya sungguh-sungguh dari para ulama (Mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.²⁵ Sedangkan Siyasah berasal dari kata *Sasa-yasusu-siyasah* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf dalam buku fiqh siyasah karangan Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag mendefinisikan bahwa siyasah adalah ”pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”²⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya hubungan antara bernegara dan bermasyarakat. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam Fiqh Siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h.3.

²⁶ *Ibid*, h.4.

pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.²⁷

2. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat dari para ulama dalam menetapkan ruang lingkup kajian fiqh siyasah, menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi enam bidang, sedangkan menurut Abdul al-Wahab Khallaf membagi atas tiga bidang, menurut T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy salah satu ulama terkemuka Indonesia membagi atas delapan bidang.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama*, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*), mengkaji tentang penetapan hukum (*tasyri' iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha' iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua*, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah*). Bagian ini mencakup tentang hubungan keperdataan antara warga Negara yang Muslim dengan warga yang non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara Negara Muslim dan non-

²⁷Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), h.2-3.

Muslim, (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga hubungan internasional, yang mencakup tentang jual-beli, perjanjian, perikatan, dan hutang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencat senjata. *Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.²⁸

3. Siyasah Syar'iyah

Siyasah syar'iyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam, yakni berdasarkan atas Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasul. Abdurahman Taj yang merumuskan *Siyasah Syar'iyah* dalam buku *Fiqh Siyasah* karangan Muhammad Iqbal, bahwa sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan ummat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h.16.

terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan.²⁹ Sementara para *fuqaha*, mendefinisikan *Siyasah Syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa hakikat *Siyasah Syar'iyah*, yakni :³⁰

- a. Bahwa *Siyasah Syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amr*).
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudhartan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*).
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.

Untuk mengukur bahwa suatu kebijakan politik yang dikeluarkan sesuai dengan syariat, maka pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah, sebagaimana atas perintah Allah SWT dalam Surah Al-Imran:159 dan Asy-Syura:38 yang pada substansinya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :³¹

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dari Syariat Islam

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h.5.

³⁰ *Ibid*, h.6.

³¹ *Ibid*, h.7.

- b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintah (*al-musawah*).
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakan (*adam al-haraj*)
- d. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf' al-mafasid*).

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan peninjauan pustaka dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan “Pemikiran Politik HOS Tjokroaminoto tentang Peran dan Fungsi Partai Politik Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Buku Cita Dasar dan Pola Perjuangan Sarekat Islam”.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Novianto Ari Prihatin yang berjudul “Islam dan Demokrasi: Sebuah *Ijtihad* Partai Politik Islam (Studi Kasus Partai Masyumi dan Partai Keadilan Sejahtera)”. Jurnal Partai Politik. Universitas Negeri Yogyakarta. Islam dan Demokrasi menilai penerapan Demokrasi pada masyarakat Islam Indonesia hanya akan memunculkan hukum-hukum spekulatif yang pada akhirnya akan mengesampingkan hukum-hukum Tuhan. Perdebatan panjang mengenai sistem politik yang harus dipilih oleh umat Islam akhirnya tertuju pada sebuah sistem Demokrasi ketuhanan sebagai sebuah hasil *ijtihad* politisi Muslim. Kelompok Islam pro-Demokrasi ini meyakini bahwa standar politik Islam terletak pada esensi dan prinsip, bukan pada sistem dan bentuk

politiknya. Demokrasi tetap bisa beriringan dengan Islam dengan syarat esensi dan prinsip yang diperjuangkan adalah untuk menegakkan hukum Islam. Beberapa partai yang termasuk golongan ini diantaranya adalah Partai Masyumi dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Masyumi adalah sebuah partai politik Islam yang lahir pasca proklamasi dengan membawa misi memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, sementara PKS adalah partai produk Reformasi yang menjadikan Demokrasi sebagai sarana untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Meski membawa misi yang berbeda, kedua partai ini tetap menggunakan jalur parlemen sebagai hasil *ijtihad* politik untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia.³² dalam penelitian yang dilakukan Novianto Ari Prihatin diatas hanya terpaku dalam penelitian terkait partai politik yang berideologikan Islam dalam Demokrasi, dalam penelitian ini belum terdapat pemaparan tentang peran dan fungsi partai politik dalam memberikan kontribusi bagi ummat atau masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Angga Natalia, yang berjudul “Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak di Indonesia Tahun 2015”. Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam. IAIN Raden Intan Lampung. 2015. Partai politik dibentuk untuk menjalankan kekuasaan politik baik ketika membentuk pemerintahan atau ketika partai politik sebagai oposisi di dalam pemerintahan. Partai politik diadakan tidak lain untuk mencapai kekuasaan baik di lembaga eksekutif maupun lembaga

³²Novianto Ari Prihatin, “Islam Dan Demokrasi: Sebuah *Ijtihad* Partai Politik Islam (Studi Kasus Partai Masyumi Dan Partai Keadilam Sejahtera)”.Jurnal Partai Politik.

legislatif. Salah satu fungsi dari partai politik adalah sarana rekrutmen politik yang dilakukan melalui pemilu yang sudah lazim dilaksanakan dinegara-negara demokratis untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Fungsi inilah yang dirasa belum maksimal karena pada proses pilkada serentak tahun 2015 ini ada beberapa daerah yang memiliki kandidat tunggal kepala daerah, bahkan daerah yang memiliki dua sampai tiga calon pun dikhawatirkan pada akhirnya akan memunculkan juga kandidat tunggal dikarenakan banyak yang tidak lolos verifikasi. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada dipertanyakannya nilai-nilai demokrasi yang berlaku di Indonesia dan kinerja partai politik dalam melahirkan kader-kader pemimpin bangsa.³³ dalam penelitian di atas telah dipaparkan bagaimana fungsi dari partai politik yang salah satunya adalah sebagai sarana rekrutmen. Namun dalam proses sebagai sarana rekrutmen ini tidak dijelaskan bagaimana Islam mengaturnya. Karena ketika di jabarkan dalam konsep Islam, maka hal ini bisa menjadi suatu pandangan yang kedepan dapat mengarahkan para elit partai politik dalam melaksanakan rekrutmen yang benar sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan Al-Sunnah Rasul.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Bainatun, yang berjudul “Islam dan Sosialisme Dalam Perspektif HOS. Tjokroaminoto dan Mohammad Hatta”. Fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017. Hasil dari penelitian ini 1). HOS Tjokroaminoto dan

³³Angga Natalia, “Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun2015”. Jurnal Partai Politik. 2015.

Mohammad Hatta mempunyai konsep pemikiran yang sama tentang Islam dan Sosialisme yang sama-sama menginginkan dan mewujudkan suatu masyarakat dan mempunyai hak kemerdekaan, persamaan dan keadilan yang tidak memandang dari segi suku, ras, budaya dan strata sosial masyarakat tertentu yang mengakibatkan suatu penindasan-penindasan antar kelas sosial dan sistem sosialisme yang mereka gagas diimplementasikan di kehidupan suatu masyarakat yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. 2). Sosialisme Islam di Indonesia memberikan pengaruh besar dari segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti halnya dalam aspek sosial, kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti kurangnya lapangan pekerjaan, pemerataan pembangunan otonomi daerah, birokrasi korup dan kesenjangan sosial sangat tinggi. Sedangkan dalam aspek politik demokrasi merupakan sistem pemerintahan Indonesia, dimana rakyat mempunyai hak untuk bersuara dan memilih.³⁴ Penelitian yang di lakukan oleh Siti Bainatun memaparkan terkait Islam dan Sosialisme dalam pandangan HOS Tjokroaminoto dan Mohammad Hatta telah jelas bahwa Islam merupakan sebuah agama yang sosial, namun dalam penelitian diatas perlu kiranya ditinjau dalam kontek fiqh siyasah supaya dapat diketahui alasan yang mendasarkan terkait kesesuaiannya, karena fiqh siyasah merupakan suatu

³⁴Siti Bainatun, "Islam dan Sosialisme Dalam Perspektif HOS. Tjokroaminoto dan Mohammad Hatta". Skripsi Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.,2017.

paham yang mengatur konsep pemerintahan dan negara yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A.A. Said Gatara, *Sosiologi politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Ahmad Syafi'i, *Islam dan Pancasila Sebagai Asas Negara*. Bandung: Mizan Pustaka, 2017.
- Ahmad Zainal Abidin, *Membangun Negara Islam*. Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001.
- Aji Dedi Mulawarman, *Jang Oetama Jejak dan Perjuangan HOS Tjokroaminoto*. Yogyakarta: Percetakan Galangpress, 2015.
- Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2010.
- Amalia Luky Sandra, *Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2017.
- Al-Hamdi Ridho, *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2013.
- Amelz, *HOS Tjokroaminoto: Hidup dan Perjuangan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- Amin, *HOS. Tjokroaminoto: Rekonstruksi Pemikiran dan Perjuangan*. Yogyakarta: Cokroaminoto University Press, 1955.
- Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2003.
- Hanta Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati, Dari Dilema ke Kompromi*. Jakarta: Kompas Gramedia Pustaka, 2010.
- Ihsan A.Bakir, *Ideologi Islam dan Partai Politik: Strategi PPP dalam Memasukkan Nilai-nilai Islam ke Dalam Rancangan Undang-undang di Era Reformasi*. Jakarta: Orbit Publishing, 2016.
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.

Harun Husein, *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis dan Studi Banding*. Jakarta: Perludem, 2014.

Hasbullah Bakry, *Sistematika Filsafat*. Jakarta: Wijaya, 1979.

Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik: Perspektif Barat dan Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.

HOS Tjokroaminoto, *Islam dan Sosialisme*. Bandung: Segi Arsy, 2010.

HOS Tjokroaminoto, *Tarich Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1955.

Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994.

Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2015.

Kuntojwoyo, *Identitas Politik Umat Islam*. Yogyakarta: Ircisod, 2018.

M.A. Gani, *Cita Dasar & Pola Perjuangan Sarikat Islam*. Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1984

Mansur, *Sejarah Sarikat Islam dan Pendidikan Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Maurice Duverger, "Political Parties: Their Organization and Activity in Modern State", dalam Ichlasul Amal, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988.

M. Amin Nurdin, et.al., *Prahara Partai Islam; Komparasi Konflik Internal PPP dan PKS*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2014.

Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. :Prenadamedia Group, 2014.

- Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam dari masa Klasik hingga Indonesia kontemporer*. Jakarta: Prenamedia Group, 2010.
- Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam*. Jakarta: Dian Rakyat, 2009.
- Nurcholish Madjid, *Fikih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Plural*. Jakarta: Pramadina, 2004.
- Nasihin, *Sarikat Islam Mencari Ideologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Northouse Peter G, *Kepemimpinan: Teori dan Praktik (Terjemahan bahasa Indonesia)*. Jakarta: PT.Indeks, 2013.
- Rais,M.A, *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!*. Yogyakarta: PPSK, 2008.
- Rais Lukman Fatahullah, *Menuju Partai Masa Depan: Pemikiran dan Gagasan Tentang PPP*. Jakarta: Media Dakwah, 1995.
- Seri Buku Tempo: Bapak Bangsa, *Tjokroaminoto Guru Para Pendiri Bangsa*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2011.
- Setiadi, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Soekiman D, *Kebudayaan Indis: Dari Zaman Kompeni sampai Revolusi*. Depok: Komunitas Bambu, 2014.
- Subekti V.S, *Partai Sarikat Islam Indonesia: Kontestasi Politik Hingga Konflik Kekuasaan Elite*. Jakarta: Buku Obor, 2014.
- Suharsimi Ariitkumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*; Edisi Revisi IV. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*; Edisi Lengkap; Cetakan Pertama. Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Thomas Mayer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi*. Jakarta: FES, 2012.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pasal 1 ayat (1).
- Qodir Zuly, *HTI dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Ziyad Ghazali, *Peran & Fungsi Parpol Dalam Islam*. Bogor: Al-Azhar Freshzone, 2004

2. Jurnal

Firman Manan, "Sosialisme Pemikiran Islam". *Jurnal wacana Politik*, Volume. 1 Nomor.1 Maret 2016

Hasanudin Yusuf, "Partai Politik Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Konstitusi*, Volume. 3 Nomor. 1 Januari 2014

Lili Romli, "Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia". *Jurnal Penelitian Politik*, Volume.1 Nomor.1 Agustus 2004

Maya Yunita, "Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) Dalam Menghadapi Krisis Malaise, Palembang". *Jurnal Criksetra*, Volume. 4 Nomor. 8 Agustus 2015

Nurul Azizah, "Peran dan Fungsi Partai Politik Islam". *Jurnal Karsa*, Volume. 22 Nomor. 2 Desember 2014

Sudartini S, "Konsep Kesopanan Berbicara oleh Wanita dalam Budaya Jawa". *Widyaparwa: Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan Kesastraan*, Volume. 38 Nomor. 1 Juni 2010

3. On Line

"Definisi Peran", (On-line), tersedia di: <http://kkbi.web.id/peran> (30 April 2019)

"Definisi Politik", (On-line), tersedia di :<https://id.m.wikipedia.org/wiki/politik> (8 Mei 2019)